



## Perbandingan Kebijakan Kurikulum Pada Sistem Pendidikan di Negara Indonesia dan Negara Jepang

Nurhayati<sup>1</sup>, Sekar Asti Andini<sup>2</sup>, Taufik Mutharom<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Universitas PGRI Yogyakarta  
[nurhayati98770@gmail.com](mailto:nurhayati98770@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received July 17, 2023

Revised July 30, 2023

Accepted August 06, 2023

#### Keywords:

Education, policy, curriculum, Indonesia, Japan

### ABSTRACT

This research is a qualitative literature survey research using comparative methods. This research is motivated by developments in technology and Indonesian human resources which continue to change with the times, and appropriate responses are needed for the implementation and development of the future curriculum. By studying how Japan implements and designs classroom education curriculum, it is hoped that it can become an example for policy and curriculum development in Indonesia. This research uses data from various literature sources, such as journals, articles, books and official publications related to the Indonesian and Japanese curriculum. The Comparative Research Model is used to present and analyze this research data. Testing the validity of the data was carried out through source triangulation, which was carried out by analyzing various literature sources. Both in Indonesia and Japan, changes in the education system are adapting to current developments. Changes continue to be made to improve the quality of education and stimulate the creative spirit of teachers to apply their insights to students in their classes. One of the important requirements for training in educational institutions is the curriculum. Curriculum is an important part of education and teaching. Different curriculum elements that are interconnected between learning objectives, materials, techniques and assessment, are the main basis for efforts to develop the learning process in educational institutions. However, ironically, Indonesia is still far behind with TIMSS and PISA scores of the same size. The research results show that there are similarities in thematic learning content and competency values found in the curriculum in Indonesia and Japan. In Japanese education, it can be seen that Moral Education is often used in classroom learning activities. This can be an example for curriculum development in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





---

## Article Info

---

### Article history:

Received July 17, 2023

Revised July 30, 2023

Accepted August 06, 2023

---

### Keywords:

Pendidikan, kebijakan,  
kurikulum, Indonesia,  
Jepang

---

## ABSTRACT

---

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif survei literatur dengan menggunakan metode komparatif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi dan sumber daya manusia Indonesia yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman, dan diperlukan respon yang tepat untuk implementasi dan pengembangan kurikulum masa depan. Dengan mempelajari bagaimana Jepang menerapkan dan merancang kurikulum pendidikan kelas, diharapkan dapat menjadi contoh bagi pengembangan kebijakan dan kurikulum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data dari berbagai sumber literatur, seperti jurnal, artikel, buku, dan publikasi resmi terkait kurikulum Indonesia dan Jepang. Model Penelitian Komparatif digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data penelitian ini. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, yang dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber literatur. Baik di Indonesia maupun Jepang, perubahan sistem pendidikan beradaptasi dengan perkembangan saat ini. Perubahan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan merangsang semangat kreatif para guru untuk menerapkan wawasannya kepada siswa di kelas mereka. Salah satu persyaratan penting untuk pelatihan di lembaga pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum merupakan bagian penting dalam pendidikan dan pengajaran. unsur kurikulum berbeda yang saling berhubungan antara tujuan pembelajaran, materi, teknik, dan penilaian, menjadi landasan utama upaya pengembangan proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Namun ironisnya Indonesia masih tertinggal jauh dengan skor TIMSS dan PISA sebesar. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesamaan isi pembelajaran tematik dan nilai kompetensi yang terdapat pada kurikulum di Indonesia dan Jepang. Dalam pendidikan Jepang terlihat bahwa Pendidikan Moral sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Hal ini dapat menjadi contoh untuk perkembangan Kurikulum di Indonesia

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

### Corresponding Author:

Author name: Fadya Dwi Kundaryanti

Universitas PGRI Yogyakarta

Email: [fadyadwi12@gmail.com](mailto:fadyadwi12@gmail.com)

---

## Pendahuluan

kebijakan adalah kegiatan formal suatu organisasi yang diselenggarakan oleh lembaga (pemerintah) yang bertujuan untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan. kebijakan juga dapat diartikan sebagai keputusan pemerintah terhadap masyarakat, dan hal ini umumnya terjadi. Kebijakan



yang mengatur sistem pendidikan disebut kebijakan pendidikan. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, telah banyak diterbitkan pedoman pendidikan yang bertujuan untuk membantu penyelenggara pendidikan dan masyarakat mengembangkan pendidikan secara inovatif. Tercapainya tujuan pendidikan bergantung pada faktor-faktor yang saling berkaitan seperti faktor pendidik, faktor peserta didik, faktor tujuan pendidikan, faktor alat pendidikan, dan faktor lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang sistematis dengan adanya keterkaitan antar subsistem. Jika terjadi masalah pada salah satu subsistem dan menghalanginya berfungsi secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, maka sistem tersebut tidak akan berfungsi. (Elwijaya et al., 2021).

Kebijakan pendidikan menyimpang dari pemikiran Tilaar dan Nugroho (2008) yang mengungkapkan bahwa kebijakan Pendidikan tidak lepas dari hakikat Pendidikan dalam proses memanusiakan anak manusia menjadi manusia yang Merdeka. Manusia yang Merdeka adalah orang-orang kreatif yang mengekspresikan dirinya dalam suatu budaya. Manusia tumbuh dalam kebiasaan hidup yang dipupuk, hidup dalam budaya sendiri, dan menciptakan atau merekonstruksi budayanya sendiri. Struktur pemikiran tersebut mempunyai arti bahwa Pendidikan adalah suatu proses pemberdayaan yang memungkinkan peserta didik menjadi mandiri, kreatif, dan tanggung jawab atas keberadaannya sendiri. (Medtek, n.d.)

Tentu saja dalam pendidikan terdapat proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik, dan pembelajaran merupakan hal pokok atau kegiatan utama yang dilakukan pada berbagai jenjang pendidikan. Ketika mengajar di negara mana pun, hal itu tidak pernah lepas dari kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Kurikulum adalah seperangkat rencana dan kesepakatan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran dan metode yang menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Kurikulum merupakan bagian penting dari pendidikan karena mengandung banyak unsur konstruktif untuk menjamin pembelajaran yang optimal. Kurikulum secara umum diartikan sebagai gambaran visi, misi, dan tujuan pendidikan suatu negara. Hal ini juga menempatkan kurikulum sebagai pusat dari konten berharga yang diberikan dan ditujukan kepada siswa. Kurikulum bersifat fleksibel dan modern, dan seperti halnya kurikulum yang diterapkan di Indonesia, kurikulum ini senantiasa mengalami perubahan seiring dengan dinamika perubahan sosial dan tatanan sosial politik Indonesia yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Penerapan kurikulum pada pendidikan negara memerlukan berbagai pertimbangan, antara lain Perkembangan zaman, kondisi teknologi dan sosial negara. Hal ini mengakibatkan seringnya terjadi revisi dan perubahan kurikulum dengan tujuan untuk dapat mengembangkan proses pendidikan yang sesuai dengan keadaan tanah air saat ini. Sebaiknya kita



mempertimbangkan pengembangan kurikulum yang dilakukan di Indonesia secara keseluruhan. Pendidikan Indonesia harus mampu memahami kebutuhan dan upaya memajukan pemerataan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk membandingkan kurikulum Indonesia dengan kurikulum negara lain guna mengembangkan kebijakan dan implementasi kurikulum yang bermanfaat bagi pendidikan di seluruh Indonesia.

Kualitas pendidikan di Jepang dianggap salah satu yang terbaik di Asia dan mempunyai pengaruh besar terhadap pendidikan di seluruh dunia. poin ini mencerminkan konsistensi Jepang dalam tes PISA (Program for International Student Assessment) yang diterbitkan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja Jepang pada tes PISA dengan poin tetap stabil, terutama sejak tahun 2008 setelah diperkenalkannya kursus yang direvisi. Jepang berprestasi baik dalam tes sains, membaca, dan matematika, mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada masing-masing dari tes PISA yang dilaksanakan. Oleh karena itu, pendidikan Jepang mempunyai citra positif bagi perkembangan Pendidikan Indonesia. Diperlukan penelitian komparatif untuk memperoleh nilai-nilai baik yang dapat diterapkan dalam pendidikan Indonesia.

Perbandingan Pendidikan Indonesia dan Jepang mendukung dilakukannya penelitian komparatif. Studi banding ini mengkaji contoh baik praktik dan kebijakan

pendidikan Jepang yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia. Penelitian komparatif juga dapat membantu merekomendasikan dan merencanakan kebijakan di bidang pendidikan agar berfungsi lebih efektif. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan penelitian komparatif dalam rangka merencanakan pendidikan dasar di Indonesia agar dapat ditingkatkan dengan mengacu pada contoh baik Jepang baik dari segi kebijakan pendidikan maupun praktik pendidikan.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi dari beberapa penelitian terdahulu dan mensintesiskannya untuk menarik kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis isi yang memungkinkan penarikan dan pengujian Kembali kesimpulan yang valid tergantung pada konteksnya. Analisis meliputi pemilihan, perbandingan, penggabungan, dan pemilihan untuk menemukan apa yang relevan. Untuk menjaga kesinambungan proses pengkajian, pencegahan dan penghapusan informasi palsu dilakukan pemeriksaan antar perpustakaan dan perhatian terhadap komentar pengawasan yang mungkin diakibatkan terhadap komentar pengawasan yang mungkin diakibatkan oleh kurangnya penulis biografi, hal ini merupakan kesalahpahaman manusia.



## **Hasil dan Pembahasan**

### **a. Kebijakan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia**

Kebijakan sistem pendidikan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. UU Sistem Pendidikan Nasional juga menjadi bahan acuan dasar dalam pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Undang-undang ini menjamin sistem pendidikan nasional yang mampu memberikan pemerataan akses terhadap pendidikan dan meningkatkan mutu, relevansi, dan efisiensi pengelolaan pendidikan secara tepat sasaran, terencana, dan berkelanjutan. Undang-undang Sisdiknas ini juga menetapkan ketentuan yang memperbolehkan semua warga negara yang berusia 6 tahun untuk mengikuti program wajib belajar. Program wajib belajar ini merupakan tanggung jawab bersama bangsa. Baik pemerintah pusat maupun daerah harus memastikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (SD-SMP) dilaksanakan tanpa dipungut biaya. (Risna Dewi et al., 2023)

Kebijakan kurikulum di Indonesia telah berubah secara signifikan dari waktu ke waktu. Banyak yang menilai, jika menteri berganti, maka kurikulumnya juga akan berubah. Silabus sebenarnya telah mengalami perubahan sejak kemerdekaan pada tahun 1945, 1947, 1952, 1964, 1968,

1975, 1984, 1994, 2004, 2006 dan terakhir tahun 2013, atau sering kali disebut dengan kurikulum 2013. Berkali-kali mengalami perubahan hingga disebut silabus tersedia dengan kurikulum 2013 (K13). Pengulangan perubahan seperti ini merupakan hal yang wajar karena membawa risiko perubahan pada sistem politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. (289) Perubahan kurikulum yang dilakukan setiap tahunnya tentunya mempunyai tujuan tersendiri atas perubahan tersebut dan tidak menyimpang dari Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia pada Undang-Undang No.20 tahun 2003, yaitu pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan ditempuh melalui pertimbangan perwujudan manusia dan berbagai kemungkinannya, serta bertujuan untuk mewujudkan manusia ideal. (Yanuar, 2021)

Pedoman Pendidikan Dasar Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 Tahun 1990. Pasal 14 Peraturan ini merinci kurikulum pendidikan dasar yang merupakan unsur inti untuk mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan dasar. Kurikulum ini bertujuan untuk menyusun bahan ajar dan pelajaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan dasar yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum pendidikan dasar Indonesia harus mencakup berbagai mata pelajaran dan mencakup aspek penting pendidikan



karakter bagi siswa. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar paling sedikit harus memuat materi pembelajaran sebagai berikut: pendidikan agama; Bahasa Indonesia; membaca dan menulis matematika (termasuk aritmatika); Pengantar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Kerajinan dan Seni; Pendidikan Jasmani dan Kesehatan; Demikian pula untuk bahasa Inggris. (Risna Dewi et al., 2023)

Tercapainya tujuan pendidikan berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Mutu pendidikan dapat dikelola berdasarkan pedoman pendidikan yang telah ditetapkan. Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan saling berhubungan dan mempengaruhi proses sistem pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus dirumuskan dengan tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan perlu mengembangkan kebijakan pendidikan yang proaktif dan pemecahan masalah sehingga dapat mengatasi permasalahan terkait pencapaian tujuan pendidikan. Tidak mudah membicarakan sistem pendidikan. Sistem pendidikan merupakan suatu sistem yang kompleks dan saling berhubungan. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman terhadap kebijakan pendidikan agar penyelenggara dapat memahami kebijakan pendidikan yang tepat sesuai

dengan sistem Pendidikan di Indonesia. (Elwijaya et al., 2021)

Untuk mencapai tujuan ini diperlukan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Upaya tersebut dituangkan dalam Program dan Kegiatan, termasuk program terkait : 1) Meningkatkan mutu dan akses terhadap pendidikan dasar dan menengah; 2) Meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; 3) Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan Masyarakat; 4) Evaluasi mutu satuan Pendidikan; 5) Peningkatan kapasitas dosen, guru, dan tenaga kependidikan; 6) Memberikan bantuan pendidikan kepada warga negara; 7) Perkembangan dan pembinaan bahasa, pengajaran dan perlindungan; 8) peningkatan kualitas kelembagaan, tata kelola, dan layanan Pendidikan. (Muslim et al., 2021)

#### b. Kebijakan Kurikulum Pendidikan Di Jepang

Jepang yang dikenal sebagai negara samurai, memutuskan kebijakan pendidikan ada sanksi bagi orang tua ketika anaknya tidak disekolahkan. Hal ini diatur dalam UU tentang Wajib Belajar dan Pendidikan. Ada unsur keterpaksaan dalam bersekolah untuk menjadi pribadi yang beradab. Di Jepang, belajar 9 tahun adalah wajib. Selanjutnya, mata pelajaran sekolah dasar di Jepang yang terdiri atas bahasa Jepang/huruf, ilmu sosial, sains, seni/musik, olahraga, budi pekerti, ekonomi rumah tangga. Artinya



pendidikan dasar menitikberatkan pada pengembangan karakter dan pengetahuan. Kebijakan nasional Jepang mensyaratkan wajib belajar untuk anak-anak berusia antara 6-12 tahun. Dari Sekolah Dasar 99,36% dikelola oleh pemerintah dan hanya 0,65 sekolah yang dikelola swasta sehingga peran negara cukup dominan. Angka partisipasi pendidikan di sekolah dasar adalah 99%. Sekolah dasar merupakan langkah awal anak memasuki lingkungan sosial. Memberikan pendidikan dasar dini yang sesuai dengan perkembangan mental dan fisik mereka kepada anak berusia antara 6-12 tahun. Jika siswa tidak berprestasi baik dalam bidang akademik, maka ia tidak akan tinggal di kelas. Konferensi orang tua dan guru diwajibkan di semua sekolah. (Ridlwan & Ri, 2021).

Jepang saat ini merupakan negara berpendidikan paling tinggi di dunia. Faktanya, Jepang memiliki salah satu sistem pendidikan terbaik dari negara di Asia. Kemajuan pendidikan Jepang terjadi setelah reformasi sistem pendidikan yang dilakukan oleh Restorasi Meiji. Restorasi Meiji juga menandai transisi dari kepemimpinan Tokugawa yang merupakan Abad Kegelapan. Sejak saat itu, Jepang berkuasa melalui Restorasi Meiji di bawah kepemimpinan Kaisar Mutsuhito atau Meiji. Pada bulan Maret 1947, Peraturan Pendidikan Nasional Jepang (School Education Law) juga menetapkan sistem pendidikan dasar. Sistem pendidikan Jepang terdiri dari

empat tingkat, masing masing dengan tujuan, visi, dan misi tertentu yaitu: Enam tahun pertama sekolah dasar (Shogakko), tiga tahun kedua sekolah menengah pertama (Chugakko), tiga tahun ketiga sekolah menengah atas (Koutaugakkou), empat tahun keempat jenjang pendidikan tinggi (Daigaku). Sistem pendidikan yang diterapkan tidak hanya akan menjamin kemajuan pesat Jepang, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi anak-anak dan masyarakat. Pendidikan Jepang 76 mempunyai potensi yang luar biasa dalam banyak hal, tercermin dari kemampuan kognitif dan motivasi siswa yang relatif identik dengan semakin besarnya minat masyarakat untuk terus belajar. Dampak lainnya antara lain kemampuan kognitif yang lebih tinggi pada siswa, perubahan sosial yang egaliter, dan pelajaran berpikir egaliter. (Prof. Dr. Syamsu Yusuf, 2017).

Di Jepang, biaya sekolah diterapkan secara gratis mulai dari anak usia dini hingga sekolah menengah pertama. Negara ini juga berupaya meningkatkan pendidikan khusus bagi anak-anak penyandang disabilitas dan mendorong kesetaraan gender dalam pendidikan. Jepang juga akan mendukung pendidikan terkait SDGs (Sustainable Development Goals) dengan meningkatkan kurikulum dan mengadaptasi materi pembelajaran dengan Pedoman Kurikulum yang baru. (Septaria et al., 2024)



Kurikulum Jepang mengutamakan prinsip Chitoku-tai yang pada dasarnya sama dengan tiga bidang pengetahuan yang dikemukakan oleh Bloom. Yang dimaksud dengan “pengetahuan” adalah pengetahuan akademis yang kuat (Solid academic), seperti kemampuan mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan, kemampuan menemukan, mempelajari, dan memikirkan masalah secara spontan, serta kemampuan mengambil keputusan secara mandiri dan menunjukkan kemampuannya. hal tersebut didefinisikan sebagai Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan lebih baik. Oleh karena itu, pembelajaran di sekolah dasar di Jepang menekankan pada otonomi siswa, menemukan sendiri permasalahan yang ada di lingkungan dan menggali pengetahuannya sendiri, serta menyelesaikannya sendiri untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut adalah prioritas.

Berikutnya, kebajikan (virtue) merupakan aspek yang sesuai dengan ranah emosional teori Bloom, yaitu aspek yang menumbuhkan nilai, emosi, dan karakter (Richness in mind) siswa. Dengan menyadari aspek ini, guru mengajarkan kepribadian yang berbeda-beda di kelasnya dengan menjadikan mata pelajaran sebagai wadah pengajaran nilai-nilai dan kepribadian. Di kelas-kelas yang lebih rendah, mata pelajaran seperti pendidikan moral, studi kehidupan, dan studi lingkungan hidup didirikan untuk menanamkan pada siswa tidak hanya

lingkungan hidup yang merupakan sumber utama pembelajaran, tetapi juga nilai-nilai moral dan pentingnya karakter siswa. Selain itu, jam waktu pengajaran akan digunakan khusus untuk makan siang dan waktu bersih-bersih. Kegiatan tersebut juga dapat mengembangkan karakter dan nilai moral siswa melalui interaksi teman sebaya dan saling menghargai. (Yanuar, 2021).

Kurikulum Jepang dirancang khusus oleh Departemen Perencanaan Kurikulum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Departemen Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi, 2006). Seperti diketahui, pengembangan kurikulum di Jepang tidak berfokus pada perubahan mata pelajaran atau metode pengajaran. Ketika Jepang mengadaptasi kurikulum, kurikulum ini bersifat fleksibel dan responsif, sehingga memungkinkan guru untuk mempertimbangkan pengembangan kegiatan pembelajaran agar sesuai dengan penerapan kelas yang ada. Menurut (Miliyawati, 2016), tahun 1947 merupakan tahun pertama kali ditetapkannya kurikulum ini di Jepang, yakni tahun diperkenalkannya UU kurikulum. Kurikulum mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan pada tahun 1951, 1956, 1961, 1971, 1980, 1992, 2002, dan 2011. Saat menyusun kurikulum, Kementerian Pendidikan Jepang menekankan beberapa poin penting: 1) mengutamakan pengembangan





keselarasan jasmani dan rohani siswa; 2) selalu selaras dengan lingkungan; 3) memperhatikan tahapan pertumbuhan dan perkembangan siswa; dan 4) memperhatikan karakter sekolah. (Hamidah et al., 2021)

**c. Perbandingan Kebijakan Kurikulum Di Indonesia Dan Jepang**

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat fenomena menarik dalam pengembangan kurikulum pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 dimana terdapat perbedaan tren antara yang dilakukan di Indonesia dengan yang dilakukan di negara lain seperti Jepang. Pengembang kurikulum di Indonesia menerapkan proses desentralisasi, sementara pengembangan kurikulum di Jepang selaras dengan standar nasional. Proses pengembangan standar nasional di negara maju (Jepang) didasarkan pada penelitian filosofis, teoritis, dan empiris terhadap kualitas pendidikan di negara tersebut.

Dalam konteks perbandingan kurikulum internasional, khususnya dalam konteks pengembangan kurikulum di Indonesia dan Jepang, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses dinamis yang selaras dengan dinamisme dan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Perkembangan kurikulum nasional antar negara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perkembangan filsafat, politik, masyarakat, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan alam. Sementara itu, dalam konteks nasional, banyak

partai politik yang menilai keterpurukan negara merupakan cerminan gejolak di sektor ekonomi dan politik. (Wahyudin, 2021)

Terdapat persamaan dan perbedaan penting antara struktur pendidikan di Indonesia dan Jepang. negara Indonesia dan Jepang, sama-sama memiliki kebijakan yang mewajibkan warganya menerima layanan wajib belajar gratis selama 9 tahun. Kesetaraan ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk menyediakan akses pendidikan yang setara bagi seluruh komunitas. Namun terdapat perbedaan mencolok pada metode pembelajaran, struktur kurikulum, dan pengembangan nilai karakter.

Metode pembelajaran yang umum digunakan di Indonesia adalah metode ilmiah yang mencakup serangkaian langkah seperti mengamati, menanya, bereksperimen, menghubungkan, dan mengomunikasikan. Sedangkan Japan menggunakan metode pembelajaran peer tutoring yang dikenal dengan Lesson Study. Lesson study merupakan pendekatan kolaboratif di mana guru bekerja sama untuk terus menerus merancang, mengamati, dan mengevaluasi pembelajaran. Ada juga perbedaan yang jelas dalam struktur kurikulum, Indonesia memiliki kerangka kurikulum nasional yang menjadi pedoman pengembangan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan. Meskipun Jepang memiliki



kurikulum nasional, masing-masing dari sekolahnya memiliki fleksibilitas untuk merancang kurikulumnya agar sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Struktur kurikulum kedua negara Indonesia dan Jepang akan menjadi fokus analisis dari segi mata pelajaran, pelaksanaan ujian nasional, ujian akhir Semester dan sistem penilaian.

Indonesia telah mengadopsi model kurikulum yang mewajibkan semua anak mengambil semua mata pelajaran wajib, termasuk mata pelajaran tambahan dengan muatan lokal yang relevan dengan daerah setempat. Pendekatan ini mencerminkan keragaman budaya dan kebutuhan lokal yang diperhitungkan dalam kurikulum nasional. Sebaliknya, di Jepang, terdapat struktur kurikulum berstandar nasional untuk mata pelajaran wajib, yang juga mencakup mata pelajaran tambahan seperti kebiasaan gaya hidup dan keterampilan hidup. Terlihat bahwa pengenalan mata pelajaran seperti kecakapan hidup dan bimbingan gaya hidup berfokus pada penguatan karakter dan kemandirian siswa. Selain itu, kelas-kelas masalah sosial diadakan dalam mata pelajaran umum dan karyawisata, sehingga siswa dapat belajar tentang masalah-masalah sosial melalui pengalaman langsung di berbagai lokasi di luar kelas. Bedanya, Indonesia memberikan keleluasaan pada masing-masing daerah untuk menentukan tambahan muatan lokal, sedangkan Jepang fokus pada pengembangan karakter, kemandirian,

dan isu-isu sosial melalui pendekatan kurikulum nasional yang lebih terstandar berurusan dengan. (Risna Dewi et al., 2023)

### **Kesimpulan**

Meskipun sistem pendidikan di Indonesia dan Jepang memiliki tujuan yang sama, pendekatan dan implementasinya berbeda. Indonesia menghargai fleksibilitas dan otonomi di sekolah, sedangkan Jepang menghargai standardisasi dan keseragaman. Beberapa keunggulan sistem pendidikan Jepang yang dapat diterapkan di Indonesia seperti: Penekanan pada pengembangan karakter dan moral, Penilaian berkesinambungan yang lebih komprehensif, Budaya belajar yang disiplin dan fokus di sisi lain, sistem pendidikan Indonesia memiliki beberapa keunggulan yang diinginkan dan yang perlu dipertahankan, Kurikulum yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal, Peran guru sebagai fasilitator yang mendorong kemandirian belajar siswa Pada akhirnya, sistem pendidikan yang terbaik akan beradaptasi dengan kebutuhan dan keadaan masing-masing komunitas. Indonesia harus terus belajar dari negara lain, termasuk Jepang, untuk lebih meningkatkan kualitas Pendidikan.

Indonesia dan Jepang mempunyai penekanan yang sama pada pengembangan sistem pendidikan mereka, khususnya pada tingkat pendidikan dasar. Kedua sekolah tersebut menerapkan Pedoman "Wajib Belajar Sembilan tahun". Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam metode pembelajaran, struktur kurikulum, dan pengembangan kepribadian. Perubahan



kebijakan kurikulum merupakan hal biasa di Indonesia, dan institusi sekolah tidak mempunyai waktu untuk beradaptasi terhadap perubahan tersebut, sehingga dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa. pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk memasukkan kurikulum lokal, namun kurikulum ini terbatas pada bahasa, seni dan budaya lokal dan oleh karena itu biasanya tidak sepenuhnya relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Sebaliknya di Jepang, pemerintah memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk menyesuaikan struktur kurikulum dengan menambahkan mata pelajaran sesuai kebutuhan setempat. Tujuan dari ini adalah untuk menyampaikan ilmu yang lebih relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Dengan adanya perbedaan tersebut, diharapkan Indonesia dapat mengadopsi beberapa aspek struktur dan implementasi kurikulum Jepang guna meningkatkan kualitas dan kualitas pendidikan agar mampu bersaing dengan negara-negara maju seperti Jepang.

#### **Daftar Pustaka**

- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). Konsep dasar kebijakan pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 67. <https://doi.org/10.29210/3003817000>
- Hamidah, H., Junaedi, I., Mulyono, M., & Kusuma, J. W. (2021). Kurikulum dan Pembelajaran Matematika di Jepang dan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Matematika (JPM)*, 7(2), 95. <https://doi.org/10.33474/jpm.v7i2.11425>
- Muslim, A. Q., Suci, I. G. S., & Pratama, M. R. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan Di Jepang, Finlandia, China Dan Indonesia Dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(2), 170. <https://doi.org/10.25078/aw.v6i2.2827>
- Prof. Dr. Syamsu Yusuf, L. . (2017). Kumpulan Artikel Pendidikan Guru Di Dunia. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>
- Ridlwan, M., & Ri, A. '. (2021). PEDAGOGI: Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini Volume 7 Nomor 2 Agustus 2021 kebijakan pendidikan sekolah dasar 3 negara (singapur, jepang, korea selatan) dan implikasinya terhadap pendidikan sekolah dasar indonesia. *Pedagogi: Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(2), 141–



149.

Septaria Dinda, Nurul chasanah, I. A.

(2024). Mendukung Sustainable Development Goals : Studi Literatur Kebijakan Sistem Pendidikan China , atau pemasok nilai-nilai budaya , menurut pemerintah , harus dimasukkan dalam pendidikan . *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(1), 1225–1237.

Wahyudin, D. (2021). Analisis Kurikulum:

Studi Komparatif Pengembangan Kurikulum di Jepang dan Indonesia. *Inovasi Kurikulum*, 1(1), 34–48. <https://doi.org/10.17509/jik.v1i1.35610>

Yanuar, R. F. (2021). Studi Komparasi

Kurikulum Sekolah Dasar Di Indonesia Dan Jepang. *Jurnal Dharma PGSD*, 1(2), 146–161. <http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/judha>